Prosiding Seri Praktikum Ilmu-Ilmu Sosial-Politik
Seri Sosiologi: Community Empowerment
Volume 2 Nomor 2, Desember 2025
e-ISSN: 3089-7858

Pemberdayaan Sumber Daya Alam: Pariwisata Berkelanjutan Taman Wisata Alam Gunung Guntur

Muhamad Zanata[1], Nuraini[2].

[1]Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, muhammadzanata2@gmail.com
[2]Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, nuraini2uinsgd.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemberdayaan sumber daya alam melalui pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Guntur, Kabupaten Garut. Wilayah ini dikenal sebagai destinasi pendakian dan wisata alam yang memiliki potensi ekologis dan ekonomi tinggi. Namun, praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan masih menjadi tantangan serius, seperti degradasi lingkungan dan minimnya keterlibatan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pengelola, pengunjung, serta warga sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata masih minim, meskipun potensi untuk integrasi sosial-ekologis sangat besar. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka utama untuk mendorong sinergi antara konservasi lingkungan dan kesejahteraan ekonomi lokal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan lokal, pendidikan lingkungan, dan diversifikasi ekonomi sebagai strategi pemberdayaan yang berkelanjutan.
***Kata Kunci**: Pemberdayaan, Sumber Daya Alam, Pariwisata Berkelanjutan, Gunung Guntur*

Latar Belakang

Pariwisata alam telah menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan wilayah berbasis sumber daya alam, termasuk di Indonesia. Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Guntur di Kabupaten Garut merupakan salah satu kawasan konservasi yang dibuka untuk tujuan rekreasi dan edukasi lingkungan. Gunung Guntur menawarkan keindahan alam, jalur pendakian yang menantang, dan keanekaragaman hayati, menjadikannya destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, seiring meningkatnya aktivitas wisata, muncul permasalahan klasik seperti kerusakan ekosistem, penumpukan sampah, dan konflik kepentingan antara konservasi dan ekonomi wisata (Budiarti, 2021).

Selain itu, minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan menyebabkan lemahnya kontrol sosial terhadap praktik pariwisata yang tidak berkelanjutan. Masyarakat lokal sering kali hanya berperan sebagai pelengkap dan tidak dilibatkan secara signifikan dalam pengambilan keputusan, padahal mereka memiliki pengetahuan lokal yang dapat menjadi kekuatan dalam menjaga kelestarian alam (Yuliastuti, 2018).

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pariwisata alam tidak hanya bermakna peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga penguatan kapasitas sosial dan ekologis komunitas. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendekatan yang holistik diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan wisata tidak merusak daya dukung lingkungan dan tetap memberi manfaat jangka panjang (WCED, 1987).

Gunung Guntur, yang masuk dalam kawasan konservasi di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat, menghadapi tekanan besar akibat aktivitas pendakian dan pembangunan infrastruktur wisata yang tidak selalu memperhatikan aspek konservasi. Data dari BKSDA mencatat bahwa jumlah pengunjung Gunung Guntur meningkat tajam sejak 2017, namun belum dibarengi dengan manajemen sampah, jalur evakuasi, dan edukasi pengunjung yang memadai (BKSDA Jabar, 2023).

Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan sumber daya alam, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pengelola wisata, masyarakat lokal, dan wisatawan. Kolaborasi ini menjadi penting mengingat pengelolaan kawasan konservasi harus mengakomodasi kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi secara berimbang (Gerasimova, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan potensi pemberdayaan sumber daya alam melalui pariwisata berkelanjutan di TWA Gunung Guntur. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana strategi pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan dalam praktik wisata alam serta peran masyarakat dalam skema pemberdayaan tersebut.

Tinjauan Pustaka

Pariwisata berbasis alam (nature-based tourism) merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan dengan pendekatan rekreatif dan edukatif tanpa merusak kelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata berbasis konservasi atau yang dikenal dengan istilah *ecotourism* menjadi salah satu strategi penting untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis. Studi oleh Fandeli dan Mukhlison (2000) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis konservasi sangat tergantung pada partisipasi masyarakat lokal, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta adanya kebijakan pengelolaan berbasis daya dukung kawasan.

Beberapa studi terdahulu mengangkat pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian oleh Hadiwijoyo (2012) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata dapat meningkatkan kapasitas ekonomi warga sekaligus memperkuat kesadaran terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Dalam kasus pengelolaan wisata Gunung Api Purba di Yogyakarta, keterlibatan masyarakat dalam penyediaan jasa transportasi, penginapan, hingga edukasi konservasi terbukti mampu menciptakan siklus ekonomi lokal yang menguntungkan. Namun, tantangannya tetap pada distribusi peran dan keuntungan yang tidak merata serta lemahnya pendampingan dari pemerintah.

Selain itu, penelitian oleh Sunaryo (2013) mengemukakan bahwa pariwisata berkelanjutan harus berlandaskan pada perencanaan terpadu yang melibatkan multi-aktor: pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi. Dalam praktiknya, banyak pengelolaan kawasan wisata hanya dilakukan oleh pihak swasta dengan minim partisipasi masyarakat, yang akhirnya memunculkan konflik sosial, eksploitasi sumber daya, dan kerusakan ekosistem jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif menjadi kebutuhan mutlak dalam setiap skema pemberdayaan berbasis wisata.

Dalam konteks teori, penelitian ini menggunakan kerangka Pembangunan Berkelanjutan seperti yang dipopulerkan dalam laporan *Our Common Future* oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED, 1987). Konsep ini menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi utama: lingkungan (*ecological sustainability*), sosial (*social equity*), dan ekonomi (*economic viability*) yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain (Gerasimova, 2017).

Teori pemberdayaan masyarakat (*empowerment theory*) yang dikembangkan oleh Zimmermann (2000) juga digunakan untuk menekankan bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang memberikan akses atau sumber daya, tetapi tentang meningkatkan kapasitas individu

dan komunitas untuk mengontrol keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Dalam konteks wisata Gunung Guntur, teori ini penting karena sebagian besar masyarakat lokal masih berada dalam posisi marginal dalam proses pengelolaan pariwisata.

Gambar 1
Gambaran hubungan konsep pembangunan berkelanjutan dan program perberdayaan

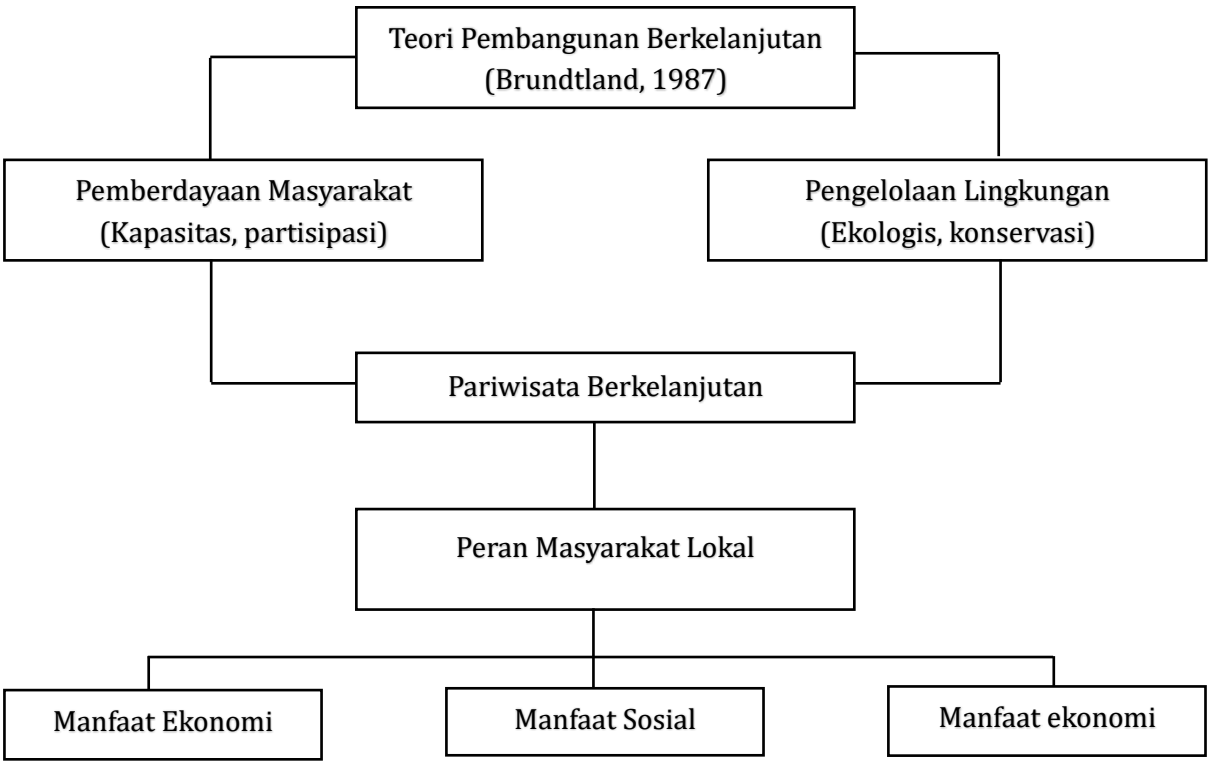

Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan sangat tergantung pada keterpaduan antara teori pembangunan berkelanjutan, praktik pemberdayaan masyarakat, serta manajemen lingkungan yang adaptif. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan wisata, maka peluang untuk menciptakan keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan ekonomi akan semakin besar (Rahadian, 2016). Oleh karena itu, kerangka teoritik ini tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga menjadi dasar penyusunan rekomendasi praktis dalam konteks pengelolaan Gunung Guntur.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami proses pemberdayaan sumber daya alam dalam kerangka pariwisata berkelanjutan di Taman Wisata Alam Gunung Guntur secara holistik dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam praktik-praktik sosial, kebijakan lokal, serta persepsi masyarakat terhadap aktivitas wisata dan pelestarian lingkungan di kawasan tersebut (Sugiyono, 2018).

Lokasi penelitian terletak di TWA Gunung Guntur, yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kawasan ini berada di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Jawa Barat dan

memiliki status sebagai taman wisata alam yang memungkinkan kegiatan wisata terbatas. Peneliti memilih lokasi ini karena potensi pariwisatanya yang tinggi sekaligus tingginya ancaman terhadap kelestarian ekologis akibat kurangnya manajemen wisata yang terintegrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi lapangan. Observasi dilakukan untuk memahami dinamika aktivitas wisata dan interaksi antara pengunjung dengan lingkungan. Wawancara dilakukan dengan beberapa kategori informan, yaitu pengelola (BKSDA dan petugas wisata), masyarakat lokal (pedagang, pemandu lokal, karang taruna), dan pengunjung. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah data kunjungan wisatawan, peta zonasi kawasan, dan dokumen kebijakan pengelolaan TWA Gunung Guntur.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara dan observasi, kemudian mengelompokkannya berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis dari pariwisata berkelanjutan. Validitas data diperkuat melalui teknik *triangulasi sumber*, yakni membandingkan data dari berbagai informan dan sumber informasi.

Hasil Kegiatan

Hasil penelitian di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Guntur menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata yang berbasis konservasi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Meskipun kawasan ini memiliki potensi ekowisata yang besar, sistem pengelolaan yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa sebagian besar kegiatan wisata belum melibatkan masyarakat lokal secara optimal dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Kegiatan observasi terhadap jalur pendakian dan area camping menunjukkan bahwa infrastruktur yang tersedia belum memadai. Jalur pendakian masih minim petunjuk arah, papan edukasi konservasi, dan tempat sampah yang layak. Akibatnya, ditemukan cukup banyak sampah plastik dan logistik sisa pendakian yang tertinggal di beberapa pos pendakian. Minimnya kontrol dan pengawasan membuat wisatawan kurang disiplin dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan (BKSDA Jabar, 2023). Kondisi ini memperlihatkan lemahnya aspek lingkungan dalam kerangka pengelolaan berkelanjutan di kawasan ini.

Wawancara dengan petugas BKSDA dan pengelola wisata mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi alasan utama mengapa edukasi dan fasilitas konservasi belum berjalan optimal. Sebagian besar operasional wisata dilakukan oleh pihak swasta yang menyewakan lahan atau menyediakan jasa logistik tanpa koordinasi terintegrasi dengan BKSDA. Kesenjangan ini menimbulkan tumpang tindih kepentingan antara konservasi dan eksploitasi ekonomi yang tidak terkendali, terutama saat musim liburan dan akhir pekan (Fandeli & Mukhlison, 2000).

Di sisi lain, hasil wawancara dengan masyarakat lokal menunjukkan bahwa mereka memiliki antusiasme besar untuk terlibat dalam pengelolaan wisata. Warga Desa Pananjung dan Kampung Citiis, misalnya, telah membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) secara swadaya. Mereka menyewakan jasa ojek ke basecamp pendakian, membuka warung makanan, serta menawarkan jasa homestay. Namun, partisipasi ini masih bersifat informal dan belum difasilitasi oleh kebijakan kelembagaan yang kuat. Sebagian warga bahkan merasa tersisih karena dominasi pengelolaan wisata dilakukan oleh pihak luar (Sunaryo, 2013).

Secara ekonomi, kehadiran wisatawan memang membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di sektor jasa. Namun, pendapatan ini bersifat fluktuatif dan tidak merata. Hanya sebagian kecil warga yang mampu memanfaatkan peluang ekonomi dari wisata, sementara lainnya masih berprofesi sebagai buruh tani atau peternak. Tidak adanya pelatihan formal tentang pengelolaan wisata, hospitality, dan konservasi membuat warga kesulitan meningkatkan kapasitas mereka dalam sektor pariwisata (Yuliastuti, 2018).

Di sisi sosial, pengelolaan wisata Gunung Guntur belum mampu mendorong keterpaduan antara pengunjung dan warga. Kurangnya forum komunikasi antara pengelola, masyarakat, dan wisatawan menyebabkan munculnya ketegangan, terutama terkait kebijakan tiket, akses lahan, dan penanganan limbah. Warga merasa bahwa kawasan mereka dieksploitasi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan sosial belum sepenuhnya dilakukan secara adil dan berkelanjutan (Zimmermann, 2000).

Namun demikian, terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan untuk menuju arah pengelolaan wisata berkelanjutan. Masyarakat lokal memiliki kearifan ekologis, seperti praktik larangan membakar hutan, pemanfaatan tanaman lokal sebagai obat tradisional, serta sistem gotong royong dalam menjaga jalur pendakian. Jika potensi ini dikolaborasikan dengan program resmi dari BKSDA atau pemerintah daerah, maka upaya konservasi dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan beriringan. Salah satu contoh praktik baik yang ditemukan adalah pelibatan pemuda lokal dalam patroli kebersihan dan pendampingan wisatawan secara sukarela pada akhir pekan.

Pembahasan

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Guntur perlu dipahami sebagai upaya integratif yang mencakup tiga aspek utama: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketiganya harus dikembangkan secara beriringan agar aktivitas wisata tidak sekadar menjadi eksploitasi sumber daya alam, melainkan juga menjadi sarana pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa orientasi pengelolaan wisata Gunung Guntur masih dominan pada aspek ekonomi tanpa dibarengi dengan strategi pelestarian dan pemberdayaan sosial yang memadai (Gerasimova, 2017).

1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan Gunung Guntur adalah minimnya tata kelola yang terpadu. Pihak pengelola dari BKSDA, pemilik lahan, dan penyedia jasa wisata kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Tidak adanya sistem zonasi yang jelas serta kelemahan dalam penegakan aturan konservasi menyebabkan kawasan ini rentan terhadap kerusakan ekologis. Sampah pendakian yang menumpuk, erosi jalur, dan gangguan terhadap satwa liar merupakan dampak nyata dari praktik wisata yang tidak dikendalikan (BKSDA Jabar, 2023).

Masalah lainnya adalah kurangnya edukasi lingkungan bagi wisatawan dan masyarakat. Banyak pengunjung tidak memahami bahwa Gunung Guntur merupakan kawasan konservasi dengan aturan ketat mengenai aktivitas manusia. Ketiadaan papan informasi, fasilitas edukatif, dan petugas penyuluh menjadikan pengalaman wisata bersifat konsumtif dan merusak. Di sisi masyarakat, rendahnya akses informasi dan pelatihan membuat keterlibatan mereka masih bersifat pasif. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang

menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam (Zimmermann, 2000).

2. Identifikasi Potensi

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Pertama, masyarakat lokal menunjukkan inisiatif yang tinggi dalam mengembangkan jasa wisata berbasis komunitas, seperti pengelolaan homestay, warung lokal, dan transportasi basecamp. Kedua, adanya kearifan lokal dalam menjaga hutan dan mata air dapat menjadi fondasi penting bagi konservasi. Ketiga, keterlibatan pemuda dalam patroli dan pendampingan wisata menunjukkan adanya modal sosial yang kuat untuk mendukung pemberdayaan lingkungan (Yuliastuti, 2018).

Potensi ini sejalan dengan pendekatan *community-based tourism* (CBT) yang menekankan pada pengelolaan wisata berbasis partisipasi lokal. Jika dimaksimalkan melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kelembagaan, masyarakat sekitar Gunung Guntur dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga kawasan dan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, strategi pengembangan wisata harus bergeser dari pendekatan eksploitatif menuju pendekatan partisipatif dan adaptif.

3. Efektivitas Pendekatan Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang menuntut keharmonisan antara konservasi, pengalaman wisatawan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui program-program seperti pelibatan masyarakat dalam pengelolaan jalur pendakian, penyediaan edukasi lingkungan kepada pengunjung, serta pembentukan lembaga pengelola wisata berbasis komunitas. Efektivitas pendekatan ini hanya dapat dicapai jika ada sinergi antar aktor: pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi (Sunaryo, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan ini belum sepenuhnya diterapkan di Gunung Guntur. Masih terdapat dominasi pihak luar dalam pengambilan keputusan dan distribusi keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi kebijakan dari pemerintah daerah atau BKSDA untuk mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan fasilitasi kelembagaan. Selain itu, pemetaan ulang daya dukung kawasan dan pengembangan jalur wisata alternatif dapat menjadi solusi dalam mengurangi tekanan terhadap ekosistem utama (Fandeli & Mukhlison, 2000).

4. Implikasi Sosial dan Ekologis

Implikasi dari tidak terintegrasinya pengelolaan wisata dapat berujung pada kerusakan lingkungan yang masif, berkurangnya kualitas pengalaman wisata, serta potensi konflik sosial antara pengelola, masyarakat, dan wisatawan. Oleh sebab itu, pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan harus dirancang dengan mengutamakan keadilan sosial dan ekologis. Hal ini mencakup redistribusi manfaat ekonomi, pelestarian nilai-nilai lokal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa Gunung Guntur memiliki peluang untuk menjadi model pengelolaan wisata berbasis konservasi yang partisipatif, namun prasyaratnya adalah komitmen semua pihak untuk mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten. Edukasi, fasilitasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem wisata yang adil dan lestari (Rahadian, 2016).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Guntur saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Ketimpangan peran antar aktor, lemahnya edukasi konservasi, serta minimnya fasilitas lingkungan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kawasan wisata yang lestari dan berkeadilan. Masyarakat lokal belum memperoleh posisi yang kuat sebagai pelaku utama, dan masih berada dalam posisi marginal dalam proses pengambilan keputusan serta distribusi manfaat ekonomi dari kegiatan wisata.

Namun demikian, terdapat potensi besar yang dapat dioptimalkan, baik dari sisi ekologi maupun sosial. Keterlibatan warga melalui Pokdarwis, praktik ekowisata sederhana, serta semangat kolektif pemuda lokal menjadi modal sosial yang harus dikuatkan melalui kebijakan yang mendukung. Masyarakat memiliki kapasitas untuk menjadi pelindung kawasan sekaligus penggerak ekonomi lokal jika diberikan pelatihan, dukungan infrastruktur, dan ruang partisipasi yang setara dalam sistem pengelolaan wisata.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan beberapa langkah konkret: (1) penguatan kelembagaan komunitas lokal agar mampu terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan wisata; (2) pelatihan masyarakat dalam bidang konservasi dan pelayanan wisata; (3) penyusunan zonasi dan daya dukung wisata berbasis kajian ekologis; serta (4) kolaborasi antara BKSDA, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam merancang strategi pengelolaan terpadu.

Pariwisata Gunung Guntur hanya akan berkelanjutan jika dikelola dengan prinsip kolaboratif, inklusif, dan adaptif. Dengan pendekatan yang tepat, kawasan ini berpotensi menjadi percontohan nasional dalam pengembangan pariwisata berbasis konservasi dan pemberdayaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II Jawa Barat yang telah memberikan izin dan informasi penting selama proses penelitian, serta kepada masyarakat Desa Pananjung dan Kampung Citiis yang telah membuka ruang dialog dan berbagi pengalaman lapangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Nuraini, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan ilmiah. Tidak lupa kepada teman-teman penulis dan keluarga yang terus mendukung selama proses penulisan artikel ini.

Referensi

BKSDA Jawa Barat. (2023). Laporan Monitoring Kawasan TWA Gunung Guntur Tahun 2022–2023. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II.

Fandeli, C., & Mukhlison, F. (2000). Pengembangan Ekowisata. Pustaka Pelajar.

Gerasimova, K. (2017). An Analysis of The Brundtland Commission's Our Common Future. Macat Library.

Hadiwijoyo, S. S. (2012). Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat. Graha Ilmu.

Rahadian, A. H. (2016). Strategi pembangunan berkelanjutan. Prosiding Seminar STIAMI, III(01).

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sunaryo, B. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Gava Media.

WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). Our Common Future. Oxford University Press.

Yuliastuti, N. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekowisata berbasis lokal. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 14(2), 113–123.

Zimmermann, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. In Rappaport, J. & Seidman, E. (Eds.), Handbook of Community Psychology (pp. 43–63). Springer.